

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan umumnya dipahami sebagai serangkaian Keputusan pemerintah yang berkaitan dengan penentuan tujuan dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, hal ini karena pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan untuk membimbing Masyarakat dan bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan umum. Menurut Wahab (2008:2), Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, dengan mempertimbangkan tantangan tertentu dan mencari peluang untuk mencapai tujuan atau memenuhi tujuan yang diinginkan. Gagasan ini merupakan langkah-langkah yang disarankan dalam mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Manongga et al., 2021). Kebijakan berfungsi sebagai alat pemerintahan, yang mencakup aspek tata kelola yang berkaitan dengan aparatur negara dan aspek yang melibatkan pengelolaan sumber daya publik. Prinsip atau metode tindakan yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan disebut kebijakan. Menurut Richard M. Titmus dalam Suharto, Kebijakan Adalah prinsip yang mengatur Tindakan yang ditujukan tertentu, dengan focus pada masalah dan Tindakan. (Hanjarwati & Aminah, 2021).

Kabupaten Ponorogo disebut sebagai "Kota Reyog" atau "Tanah Reyog" karena statusnya sebagai tempat kelahiran seni Reyog. Ponorogo, yang dijuluki "Kota Santri", merupakan rumah bagi banyak pesantren, termasuk Pesantren Modern Darussalam Gontor yang tersohor di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak. Etimologi nama "Ponorogo" berasal dari kata "Pramana Raga", yang kemudian berubah menjadi "Pana" (berarti pemahaman) dan "raga" (berarti tubuh). Oleh karena itu, "Ponorogo" merujuk pada "seseorang yang mampu mendahului dirinya sendiri daripada orang lain" (Soemarto, 2011: 15). Kabupaten Ponorogo terletak pada koordinat 111°7' hingga 111°52' Bujur Timur dan 7°49' hingga

8°20' Lintang Selatan, dan berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek di sebelah timur, serta Kabupaten Pacitan di sebelah selatan.(Cahyo Setiaji & Hanif, 2022)

Melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Indonesia telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi daerahnya, termasuk aspek budaya dan pariwisata. Kewenangan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 5 tahun tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mewajibkan pemerintah untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan mendokumentasi warisan budaya lokal sebagai komponen Pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menekankan pentingnya pengembangan pariwisata secara terencana dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi daerah. Landasan hukum ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan objek budaya dan destinasi wisata di daerahnya.

Di Tingkat nasional, pengembangan pariwisata diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menciptakan destinasi wisata unggulan yang berakar pada keunikan dan Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya lokal. Kebijakan ini didukung oleh berbagai peraturan teknis di Tingkat Menteri, termasuk Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penetapan Reyog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, yang memperkuat status Reyog Ponorogo sebagai identitas budaya nasional.

Salah satu warisan budaya Ponorogo yang kaya adalah kesenian Reyog Ponorogo, yang telah berkembang menjadi symbol nasional. Pemerintah daerah berencana membangun dan mengelola Monumen Reyog Ponorogo sebagai landmark dan objek wisata untuk meningkatkan identitas budaya dan mendorong industry pariwisata. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu

kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan potensi pariwisata yang signifikan. Ponorogo memiliki sejumlah objek wisata, seperti wisata kuliner, religi, budaya dan lingkungan.

Karena kesenian Reyog berasal dari daerah ini, Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai "Bhumi Reyog" atau Kota Reyog. Kabupaten Ponorogo juga merupakan rumah bagi berbagai tradisi budaya khas lainnya, termasuk Telaga Ngebel, sate, gule, dawet jabung, pecel, dan batik Ponorogo yang menampilkan tema-tema khas Ponorogo seperti reyog dan motif burung merak. Sekar jagad, batik reyog, merak cinta, dan merak petarung merupakan beberapa tema merak tersebut.

Pariwisata berbasis budaya merupakan salah satu bidang yang memiliki banyak ruang untuk berkembang secara regional. Salah satu manfaat pariwisata berbasis budaya adalah membantu melestarikan warisan budaya yang membentuk identitas masyarakat lokal, selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sutopo & Mahardika, 2022). Salah satu daerah di Indonesia dengan potensi budaya yang signifikan adalah Kabupaten Ponorogo, yang merupakan rumah bagi kesenian Reyog Ponorogo. Menurut Kemendikbudristek (2024), kesenian ini diakui baik di dalam maupun luar negeri, bahkan telah diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO (WBTb). Dalam hal pengembangan, pemerintah daerah berupaya menjadikan Reyog sebagai destinasi dan landmark budaya yang memiliki nilai edukasi, rekreasi dan ekonomi. Pembangunan Monumen Reyog Ponorogo, yang berfungsi sebagai tujuan wisata utama sekaligus pusat informasi dan Pendidikan adalah salah satu contoh nyata Upaya ini.

Reyog Ponorogo adalah bentuk kesenian tradisional dengan akar budaya yang kuat, berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Reyog lahir di kota Ponorogo (Rachmah, 2019). Selain memiliki nilai visual yang tinggi, bentuk kesenian ini mengandung mitos dan legenda yang merepresentasikan identitas masyarakat Ponorogo. Baik di dalam negeri maupun internasional, pertunjukan Reyog Ponorogo yang memukau dan kaya akan simbol ini telah berkembang menjadi landmark budaya Indonesia yang sangat dihormati. Meskipun berakar pada adat istiadat masyarakat Ponorogo, Reyog Ponorogo telah berkembang menjadi

lambang yang lebih komprehensif dari waktu ke waktu, yang menandakan identitas lokal Ponorogo dan budaya Indonesia secara umum. Hal ini membuktikan bahwa Reyog Ponorogo bukan sekedar warisan budaya daerah, melainkan merupakan bagian dari warisan budaya nasional yang dapat memperkuat keutuhan dan persatuan bangsa. (Azela, 2025)

Bagi masyarakat Indonesia, Reyog Ponorogo merupakan bentuk kesenian yang terkenal dan tersohor. UNESCO telah mengakuinya sebagai bentuk kesenian budaya dan menganggapnya sebagai pertunjukan seni asli (Soedarsono, 1994:98). Kaya akan nilai-nilai luhur (kebajikan), Reyog Ponorogo merupakan salah satu bentuk kesenian kekayaan budaya Jawa. Penduduk Ponorogo sangat bangga dengan karya seni Reyog Ponorogo mereka. Masyarakat mengapresiasi dan menemukan inspirasi darinya. Penduduk Ponorogo sangat bangga dengan karya seni Reyog Ponorogo mereka. Masyarakat mengapresiasi dan menemukan inspirasi darinya. Bakti (2022). Salah satu kesenian tradisional Indonesia yang memiliki makna spiritual, sejarah, dan budaya adalah Reyog Ponorogo. Hal ini menunjukkan bahwa Reyog Ponorogo merupakan salah satu komponen warisan budaya nasional yang dapat menunjang keutuhan dan persatuan bangsa, bukan hanya sekedar warisan daerah.

Di bawah kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko, kebijakan baru ditetapkan, yaitu pembangunan Monumen Reyog Ponorogo (MRP) di bekas lahan tambang batu kapur Desa Sampung, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan Desa Sampung dinilai strategis dari segi geografis karena berada di dataran tinggi. Monumen ini bertujuan untuk memperkuat citra Reyog sebagai ikon budaya dan menjadikannya landmark Kabupaten Ponorogo yang terkenal dengan kesenian tradisionalnya. Untuk mewujudkan tujuan Pembangunan ini, khususnya di sektor pariwisata, diperlukan perencanaan yang matang pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang efisien. Proses perencanaan Pembangunan pariwisata bersifat sistematis dan rasional, karena melibatkan penyusunan rencana kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pembangunan MRP tidak hanya difokuskan pada aspek fisik bangunan, tetapi juga pada penataan lingkungan sekitarnya agar terbentuk ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah daerah telah melakukan penataan permukiman, jaringan air bersih, drainase, serta perbaikan infrastruktur jalan di kawasan sekitar monumen. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyambut terbentuknya kawasan wisata baru yang diharapkan dapat meningkatkan Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya wisatawan dan kesejahteraan masyarakat setempat (Kominfo, 2025). Pembangunan monument ini juga tidak terlepas dari momentum penting, yaitu penetapan Reyog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO pada 3 Desember 2024.

Keputusan UNESCO tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan pelestarian budaya sekaligus menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa penetapan Reyog sebagai WBTb tidak hanya menjadi pengakuan dunia terhadap budaya Ponorogo, tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Melalui proyek ini, diharapkan pelestarian budaya dan pengembangan wisata dapat berjalan beriringan sehingga Ponorogo mampu menjadi salah satu destinasi unggulan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan dukungannya nyata terhadap Pembangunan Monumen Reyog Ponorogo melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp. 30 miliar yang bersumber dari pos bantuan keuangan daerah. Gagasan Pembangunan monument ini telah muncul bahkan sebelum pelantikan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Idra Parawansa.

Namun demikian, dalam tahap awal pembangunan dan perencanaannya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan implementasi, seperti koordinasi antarinstansi, kesiapan anggaran, keterlibatan masyarakat lokal, serta keberlanjutan pengelolaan di masa depan. Tantangan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tidak semata-mata bergantung pada keputusan politik, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan di lapangan dan kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi sosial Masyarakat (Meter & Horn,

1975). Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada kualitas formulasi kebijakan di tingkat pengambilan keputusan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pada tahap implementasi. Model ini menekankan adanya enam variabel utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan dan kualitas sumber daya, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik sekitar, serta disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan itu sendiri.

Keenam variabel ini bersifat saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi secara optimal, maka implementasi kebijakan berpotensi tidak efektif atau bahkan gagal dalam mencapai tujuannya. Penilaian terhadap Tingkat kejelasan standar dan target kebijakan, ketersediaan sumber daya keuangan dan manusia untuk mendukung program, serta pola koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait, semuanya krusial dalam pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar monumen, karakteristik aparat pelaksana program, dan sikap pelaksana kebijakan dalam memantau program agar sejalan dengan visi daerah juga turut dipertimbangkan.

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas Monumen Reyog Ponorogo telah menunjukkan beragam metode dan area penekanan. Penelitian (Nurmalasari & Qudus, 2024) yang dipublikasikan di Jurnal RESLAJ menggarisbawahi pelaksanaan kebijakan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo, yang mengungkapkan bahwa masalah koordinasi antarlembaga dan kurangnya keterlibatan publik menghambat proses perencanaan. Meskipun demikian, penelitian ini tidak memberikan penjelasan komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dari sudut pandang teori kebijakan publik.

Selain itu, penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Teknik, berjudul "Alternatif Desain Struktur Bangunan Monumen dan Museum Reyog Ponorogo dengan Sistem Bandul Gesek", menekankan fitur teknis dan ketahanan struktural monumen. Sementara itu, penelitian (Leandra & Rahmawaty, 2024)

tentang Kajian Makna Simbolik Patung dan Monumen di Kabupaten Ponorogo menekankan nilai-nilai filosofis dan fungsi monumen sebagai media pembelajaran sejarah lokal, tetapi tidak membahas aspek tata kelola atau kebijakan publik.

Penelitian lain oleh (Pramesti, 2024) berjudul "Museum Reyog Ponorogo dengan Pendekatan Sejarah di Desa Sampung Ponorogo", yang menekankan pentingnya mengintegrasikan pendekatan edukatif ke dalam perancangan dan pengelolaan museum Reyog. Penelitiannya lebih berfokus pada arsitektur dan narasi sejarah daripada bagaimana pemerintah daerah memengaruhi perencanaan kebijakan pengelolaan monumen. Tinjauan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada dimensi kultural, simbolik, dan teknis, sementara penelitian yang mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait perencanaan dan pengelolaan monumen budaya masih sangat terbatas.

Studi ini mengungkap kesenjangan penelitian yang dapat diisi oleh penelitian ini. Pertama, studi-studi sebelumnya belum secara menyeluruh mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan terkait perencanaan dan pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo. Kedua, belum ada penelitian yang secara eksplisit menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) untuk mengkaji kebijakan terkait pengelolaan monumen berbasis budaya. Ketiga, hubungan antara dimensi kebijakan publik dan keterlibatan masyarakat serta keberlanjutan budaya lokal dalam pengembangan ikon-ikon pariwisata daerah belum ditemukan oleh penelitian apa pun (Mustika Hari et al., 2025)

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait perencanaan Monumen Reyog Ponorogo. Studi ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap capaian dan tantangan kebijakan tersebut, tetapi juga untuk menyelidiki integrasi koordinasi antarlembaga, komunikasi antarsektor, dan keterlibatan masyarakat ke dalam proses perencanaan. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang dinamika yang terlibat dalam implementasi kebijakan daerah terkait pengembangan ikon budaya yang

dianggap penting secara strategis bagi identitas dan pariwisata Ponorogo, dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975).

Di sisi lain, prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi, sebagaimana ditegaskan oleh World Bank (1992) harus menjadi landasan semua tahap perencanaan kebijakan. Pedoman ini penting untuk kepatuhan administratif dan memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan cara yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Program yang kurang tepat sasaran, sulit diterima masyarakat lokal, dan tidak berkelanjutan dapat diakibatkan oleh pelaksanaan kebijakan yang bersifat top-down dan minimnya masukan dari masyarakat. Dengan demikian, untuk menjamin kelangsungan program dalam jangka panjang, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo menjadi penting, baik secara normatif maupun substantif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemerintah mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Monumen Reyog sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata di Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Monumen Reyog sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arahan dan perhatian dalam rangka mengatasi masalah yang diidentifikasi. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait pembangunan Monumen Reyog Ponorogo sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya wisata telah dijalankan selama masa perkembangannya.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait pembangunan Monumen Reyog Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua orang yang membaca anatara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik di tingkat daerah yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata.
 - b. Berfungsi sebagai referensi tambahan untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan daerah terkait pembangunan aset budaya dan pariwisata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo tentang cara merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo agar lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai budaya setempat.
 - b. Bertindak sebagai bahan penilaian bagi para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pariwisata, masyarakat setempat, dan seniman budaya, untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam Pembangunan Monumen Reyog Ponorogo.
 - c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang pentingnya pengawasan Monumen Reyog Ponorogo sebagai simbol budaya dan pariwisata dalam konteks pembangunan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk memperjelas makna istilah yang digunakan dan menggambarkan ruang lingkup permasalahan. (Fallis, 2022) Di

antara hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan public yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, mulai dari tahap penerjemahan kebijakan ke dalam program dan kegiatan, hingga pelaksanaannya di lapangan oleh aktor-aktor yang terlibat, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Keputusan atau Tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam bentuk peraturan, program, atau rencana kerja yang berkaitan dengan Pembangunan Monumen Reyog sebagai bagian dari Pembangunan daerah.

3. Pembangunan

Pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat identitas dan daya saing daerah.

4. Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata

Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya wisata adalah upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengelola objek wisata berbasis budaya yang mencerminkan karakter dan jati diri daerah, sekaligus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Studi "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muaro Jambi sebagai Situs Warisan Dunia" oleh Rika Susanti dan Indra Permana (2021) bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan dalam pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi sebagai situs warisan dunia. Studi ini

mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah daerah direncanakan, diimplementasikan, dan dipantau terkait pengembangan pariwisata dan pelestarian nilai sejarah Candi Muaro Jambi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung, promosi pariwisata, dan pelibatan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa koordinasi lintas sektor yang belum memadai, keterbatasan dana, dan konsistensi program yang belum memadai. (GUNAWAN, 2022)

Penelitian ini berbeda dengan rencana penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Monumen Reyog sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata di Kabupaten Ponorogo" dari segi objek dan konteksnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Susanti dan Indra Permana berfokus pada Candi Muaro Jambi sebagai situs budaya warisan dunia, sementara penelitian Anda berfokus pada Monumen Reyog Ponorogo yang berfungsi sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata lokal. Perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap perencanaan kebijakan pemerintah daerah dan strategi pengelolaan yang ditujukan untuk mengubah monumen atau Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata menjadi pusat pariwisata berkelanjutan meliputi kemitraan dengan sektor swasta dan keterlibatan masyarakat menunjukkan kesenjangan yang dapat diatasi, karena hal ini belum dieksplorasi secara menyeluruh dalam studi sebelumnya.

2. Artikel berjudul "Seni Reyog sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata Budaya di Kabupaten Ponorogo" karya Susana Tunggal Turhumawati (2008) telah diterbitkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status terkini seni Repog Ponorogo, kontribusinya terhadap kemajuan pariwisata budaya, dan keterlibatan pemerintah dalam mempromosikan seni Reyog sebagai symbol pariwisata budaya. Penelitian ini berfokus pada dampak soial ekonomi dari Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya wisata budaya di Reyog Ponorogo, keragaman budaya yang ada dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan seni Reyog. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif

kualitatif, dengan menggunakan observasi, wawancara, analisis dokumen dan tinjauan Pustaka. Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa kesenian Reyog Ponorogo lebih menarik dibandingkan kesenian lainnya, sehingga mendorong pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk merancang inisiatif jangka pendek dan jangka Panjang untuk pengembangannya. Temuan studi ini menegaskan bahwa Reyog Ponorogo merupakan warisan budaya yang memiliki makna filosofi, religious dan edukatif yang harus dilestraikan dan didukung oleh Masyarakat dan sumber daya manusia berkualitas. (Whitney G.G., 2022)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo sebagai sektor Pariwisata dan Identitas Budaya di Kabupaten Ponorogo" dalam hal fokus dan unit analisisnya. Penelitian Turhumawati (2008) menyoroti seni Reyog sebagai objek wisata dan ikon budaya, sementara penelitian Anda berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan monumen Reyog sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya wisata, dengan penekanan lebih besar pada aspek kebijakan publik, tata kelola, dan perencanaan pembangunan. Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi berkaitan dengan belum adanya studi yang mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait perencanaan dan Pembangunan monumen Reyog, yang berfungsi sebagai symbol fisik dan representasi kebijakan budaya yang berorientasi Pembangunan. Oleh karena itu, penelitian anda inovatif karena menggabungkan elemen-elemen implementasi kebijakan dan perencanaan Pembangunan budaya yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

3. Artikel "Museum Reyog Ponorogo dengan Pendekatan Sejarah di Desa Sampung Ponorogo" karya Emerald Diza Pramesti dan Rahmanu Widayat (2024) terbit di Jurnal Seni Rupa TAMA, Vol. 2, No. 2 (2024). Tujuan penelitian ini adalah menciptakan desain interior Museum Reyog Ponorogo yang terletak di Desa Sampung, Kabupaten Ponorogo, dengan pendekatan sejarah. Upaya ini bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya Reyog

Ponorogo. Penelitian ini tidak hanya mengkaji desain spasial, tetapi juga fungsi museum sebagai media edukasi dan destinasi wisata budaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif, meliputi tahapan pemrograman, survei lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis literatur. Tahapan ini dilanjutkan dengan pembuatan konsep desain menggunakan perangkat lunak pemodelan. Temuan studi ini menyoroti pentingnya memamerkan Museum Reyog Ponorogo melalui lensa naratif-historis. Pendekatan ini akan memungkinkan pengunjung untuk menelusuri sejarah Reyog secara kronologis dari awal mulanya yang legendaris hingga saat ini, sekaligus memposisikan museum sebagai pusat pendidikan dan landmark wisata budaya yang baru. (Pramesti, 2024)

Perbedaan utama dengan penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Monumen Reyog Ponorogo sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata di Kabupaten Ponorogo" terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Emerald Diza Pramesti berfokus pada desain interior museum dan aspek naratif-historis sebagai strategi pelestarian, sementara penelitian Anda berfokus pada perencanaan implementasi kebijakan pemerintah daerah tingkat makro untuk pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo, dengan menekankan proses kebijakan publik, manajemen kelembagaan, dan integrasi pembangunan budaya dan pariwisata. Oleh karena itu, kesenjangan penelitian yang muncul adalah belum adanya penelitian yang menghubungkan desain museum/monumen dengan kajian implementasi kebijakan publik yang menyeluruh. Diharapkan penelitian Anda akan mengatasi kesenjangan ini dengan menggarisbawahi seberapa banyak kebijakan pemerintah daerah ditetapkan dalam pengembangan dan pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo sebagai ikon budaya dan pariwisata selama era pembangunan, dan menghubungkan hal ini dengan dampak pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan pelestarian budaya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Cahyo Setiaji dan Muhammad Hanif (2021), berjudul "Kajian Makna Simbolik Patung dan Monumen di

Kabupaten Ponorogo sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal", bertujuan untuk mengungkap latar belakang sejarah dan makna simbolis patung dan monumen di Kabupaten Ponorogo, serta potensinya sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal. Penelitian ini berfokus pada identifikasi simbol-simbol Reyog Ponorogo yang diabadikan dalam patung dan monumen kota, termasuk patung Dewi Songgolangit, Klono Sewandhana, Bujang Anom, Warok, Jathilan, dan Harimau. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan triangulasi sumber data yang melibatkan pemerintah daerah, sejarawan lokal, dan arsip resmi. Kesimpulan utama penelitian ini menunjukkan bahwa patung dan monumen tersebut didirikan di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Markum Singodimedjo untuk meningkatkan estetika kota dan memperkuat identitas Ponorogo sebagai kota Reyog. Lebih lanjut, patung dan monumen ini berfungsi sebagai media pendidikan sejarah bagi masyarakat, khususnya generasi muda, yang membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai budaya lokal Ponorogo. (Cahyo Setiaji & Hanif, 2021)

Perbedaan mendasar dari penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Monumen Reyog Ponorogo sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya di Kabupaten Ponorogo" terletak pada cakupan dan fokus penelitian. Penelitian Setiaji dan Hanif menekankan signifikansi edukatif dan dimensi simbolis monumen dan arca sebagai alat pembelajaran sejarah lokal, sementara penelitian yang dimaksud lebih berfokus pada bagaimana kebijakan pemerintah daerah dijalankan, khususnya dalam hal perencanaan dan pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo terkait dengan pengembangan budaya dan pariwisata secara makro. Kesenjangan penelitian yang muncul adalah masih minimnya penelitian yang secara komprehensif menghubungkan makna simbolis arca/monumen dengan kebijakan publik dan strategi pengembangan pariwisata. Diharapkan penelitian Anda akan mengatasi kesenjangan ini dengan menyelidiki penerapan praktis kebijakan pemerintah daerah terkait

dengan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Monumen Reyog Ponorogo, dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata yang berkelanjutan.

5. Sri Hartono dan Alip Sugianto (2021) menulis "Mempertimbangkan Potensi Pariwisata Berbasis Sejarah Lokal di Kabupaten Ponorogo." Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi pariwisata sejarah di Kabupaten Ponorogo, dengan penekanan khusus pada kawasan Jalan HOS Cokroaminoto. Kawasan ini diusulkan untuk didesain ulang menyerupai Malioboro di Yogyakarta, dan terdapat rencana pembangunan monumen yang didedikasikan untuk HOS Cokroaminoto. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yang menggabungkan data dan dokumen situs bersejarah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi pariwisata sejarah, buatan, religi, dan edukasi di Jalan HOS Cokroaminoto, beserta dampak ekonomi kreatif yang dapat dihasilkan dari pengembangan kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, kawasan Jalan HOS Cokroaminoto memiliki nilai sejarah yang sangat penting dan dapat menjadi pusat wisata sejarah, religi, edukasi, dan ekonomi kreatif bagi masyarakat Ponorogo. Lebih lanjut, pendirian monumen HOS Cokroaminoto diyakini akan memperkuat identitas Ponorogo sebagai kota budaya dan sejarah yang berdampak pada nasionalisme dan kesadaran publik. (Hartono & Sugianto, 2021)

Cakupan dan pendekatan penelitian ini berkaitan dengan "Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Monumen Reyog sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata" Penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Sugianto berfokus pada identifikasi potensi wisata sejarah di sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto dan kajian dampaknya terhadap masyarakat setempat. Sebaliknya, penelitian yang Anda maksud lebih berfokus pada bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterapkan dalam perencanaan dan pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kebijakan publik, perencanaan strategis, dan tata kelola terkait pengembangan budaya dan pariwisata. Kesenjangan

penelitian yang teridentifikasi adalah minimnya studi yang menghubungkan prospek wisata sejarah atau pembangunan monumen dengan kajian menyeluruh terhadap implementasi kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kesenjangan tersebut dengan menunjukkan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan Monumen Reyog Ponorogo, sehingga dapat berfungsi sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah masih didominasi oleh pembahasan yang menitikberatkan pada tahap pelaksanaan kebijakan, pengelolaan program pembangunan, serta dampaknya terhadap perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Sebagian besar penelitian tersebut lebih berorientasi pada output dan outcome kebijakan, sementara pembahasan mengenai proses perencanaan kebijakan sebagai fondasi awal dalam menentukan keberhasilan implementasi belum banyak dikaji secara mendalam. Di samping itu, kajian yang secara khusus membahas pengelolaan monumen budaya sebagai ikon daerah masih tergolong terbatas. Padahal, monumen budaya tidak hanya berperan sebagai daya tarik wisata, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai simbol identitas dan representasi nilai-nilai budaya lokal.

Penelitian yang mengaitkan antara kebijakan pemerintah daerah, proses perencanaan pengelolaan, serta upaya pelestarian budaya lokal masih jarang ditemukan, terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik budaya yang kuat seperti Kabupaten Ponorogo. Lebih lanjut, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam proses perencanaan pengelolaan Monumen Reog Ponorogo dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Padahal, teori tersebut menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk menelaah berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan,

seperti kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, pola komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan fokus sekaligus nilai kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan menempatkan perhatian pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam proses Pembangunan Monumen Reog Ponorogo sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian yang ada (research gap) serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian kebijakan publik, dan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis pada potensi dan pelestarian budaya lokal.

Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang belum terjawab dalam studi-studi sebelumnya, khususnya terkait analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan Monumen Reyog Ponorogo sebagai sektor pariwisata dan identitas budaya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada aspek simbolik, kultural, teknis arsitektural, maupun nilai edukatif monumen, penelitian ini secara spesifik mengkaji proses implementasi kebijakan publik dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini berfokus pada bagaimana standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, disposisi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi keberhasilan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam kajian implementasi kebijakan daerah, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berbasis budaya yang berkelanjutan dan partisipatif.

G. Landasan Teori

Teori Implementasi Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn (1975) Van Meter dan Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan berjudul "Sebuah Model Implementasi Kebijakan" (1975). Proses implementasi merupakan abstraksi atau kinerja, yang berfungsi sebagai perwujudan kebijakan yang pada dasarnya dijalankan dengan tujuan mencapai kinerja implementasi kebijakan tingkat tinggi di tengah berbagai variabel yang saling terkait. (Hernawan & Pratidina, 2023). Sebagaimana dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:135), "Implementasi kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam pemerintahan atau sektor swasta untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya." Menurut Van Meter and Van Horn dalam Winarno (1991:295): Implementasi kebijakan adalah fase lanjutan setelah formulasi kebijakan. Selama tahap formulasi, strategi dan tujuan kebijakan diimplementasikan. Sementara itu, pada tahap implementasi kebijakan, langkah-langkah diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi melibatkan interaksi antara serangkaian tujuan dan tindakan yang dapat mencapainya. (Rosidi, 2022)

Model ini menyoroti bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel penting yang saling terkait. Variabel-variabel tersebut antara lain:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives)

Standar kebijakan mengacu pada ukuran atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu kebijakan dapat diimplementasikan. Standar-standar ini berkaitan erat dengan bagaimana para pelaksana kebijakan memahami dan menjalankan pekerjaan mereka, menjamin bahwa tujuan kebijakan dapat dicapai secara realistis sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada. Disposisi para pelaksana berkaitan erat dengan standar kebijakan. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana para pelaksana cenderung berinteraksi dengan standar kebijakan. Jika tujuan suatu kebijakan tidak dipahami oleh para pelaksana, mereka mungkin gagal menerapkannya. (Union et al., 2023) Sasaran atau

hasil yang ingin dicapai suatu kebijakan melalui implementasinya dikenal sebagai tujuan kebijakan.

Tujuan ini membantu pelaksana rencana memahami apa yang harus dicapai, dan berfungsi sebagai acuan untuk menilai keberhasilan atau efektivitas kebijakan tersebut. Untuk mencegah kegagalan kebijakan, tujuan kebijakan harus jelas, spesifik, dan realistis agar dapat diukur dan direalisasikan selama implementasi. Standar dan tujuan kebijakan berfungsi sebagai indikator penting untuk menganalisis dan menilai implementasi kebijakan publik. (Collins et al., 2021) (Union et al., 2023) Dalam penelitian ini, tolak ukur dan tujuan kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo mengenai perencanaan pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo dijadikan landasan utama untuk mengevaluasi seberapa besar kebijakan tersebut dapat dicapai sebagai ikon budaya dan pariwisata.

2. Sumber Daya (resources)

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam melaksanakan kebijakan publik. (Auldrin M. Ponto, 2020) Sumber daya mengacu pada segala sesuatu yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan secara efektif. Dalam ranah kebijakan publik, sumber daya mengacu pada serangkaian elemen termasuk personel, pendanaan, infrastruktur, data, dan yurisdiksi yang esensial untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, dukungan finansial, infrastruktur, data dan kewenangan. Kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun sulit diimplementasikan tanpa sumber daya yang memadai. Keberhasilan kebijakan yang dirancang pemerintah daerah terkait pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo akan bergantung pada ketersediaan anggaran, tenaga ahli, teknologi informasi dan sumber daya pendukung lainnya.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana (Characteristics of Implementing Agencies)

Kualitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi pelaksana, pola koordinasi antarlembaga, dan kapasitas birokrasinya. Pembagian tugas yang lebih jelas dan profesional dalam

organisasi pelaksana akan meningkatkan efektivitas kebijakan. Dalam studi ini, karakteristik organisasi pelaksana mencakup entitas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida), dan sektor swasta/masyarakat yang terlibat.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan (Inter-Organizational Communication and Enforcement Activities)

Komunikasi yang efektif antar organisasi dan kualitas kegiatan implementasi sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. (Van Meter & Van Horn, 1975) ber teori bahwa komunikasi yang efektif antar lembaga pelaksana sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dipahami dan diterapkan secara konsisten. Di saat yang sama, sebuah studi yang dilakukan oleh (Kogoya et al., 2024) menguatkan bahwa implementasi kebijakan yang efektif bergantung pada koordinasi lintas sektor yang terbuka dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses implementasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh hubungan timbal balik antara komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi. Dalam pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo, kedua aspek ini penting untuk mencapai pengelolaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang memperkuat identitas budaya dan pariwisata daerah.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition of the Implementers)

Agar implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasarannya, para pelaksana harus memiliki karakteristik atau kecenderungan tertentu. Para pelaksana kebijakan harus memiliki sifat-sifat kunci seperti integritas dan dedikasi yang tinggi. Kejujuran akan memandu para pelaksana untuk mengikuti program yang telah ditentukan, sementara komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan akan memotivasi mereka untuk melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Utara, 2020) Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan. Ketika pejabat pemerintah memiliki persepsi positif, rasa kepemilikan, dan

komitmen yang kuat terhadap kebijakan, implementasi menjadi lebih efektif. Di sisi lain, sikap yang kurang baik dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (Economic, Social, and Political Conditions)

Faktor lingkungan eksternal seperti Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program. Kondisi ekonomi mencakup sumber daya finansial dan material yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Kondisi sosial mencakup penerimaan, partisipasi, dan dukungan publik terhadap kebijakan, serta norma, budaya, dan struktur sosial. Kondisi politik mencakup dukungan atau penolakan dari elit politik dan kelompok kepentingan, serta stabilitas dan dinamika politik yang memengaruhi proses implementasi kebijakan. Ketiga kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan untuk mencapai tujuannya, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan program atau kebijakan. (Kurniati et al., 2022)

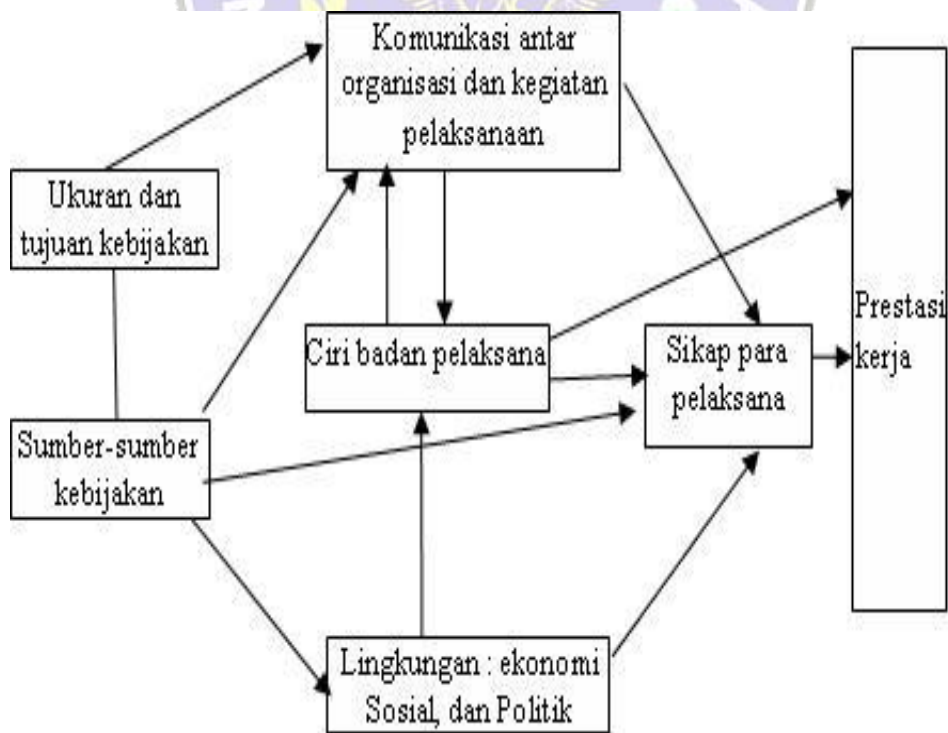
Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi, dukungan politik, dan lingkungan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks Monumen Reyog Ponorogo, faktor-faktor seperti dukungan masyarakat setempat, pemahaman budaya, kebijakan pemerintah pusat, dan dinamika politik daerah dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Karena model implementasi Van Meter dan Van Horn mengonseptualisasikan kebijakan sebagai suatu sistem yang dibentuk oleh berbagai variabel, model ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang memfasilitasi atau menghambat implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo terkait perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo.

Dalam tesis ini, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn diterapkan untuk:

- Menilai seberapa selaras standar dan tujuan kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi di lapangan.
- Mengevaluasi apakah sumber daya pemerintah daerah memadai untuk mengelola Monumen Reyog Ponorogo.
- Meneliti karakteristik organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, sifat komunikasi, dan bagaimana perasaan pejabat pelaksana kebijakan terhadapnya.
- Mengkaji elemen eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, termasuk yang memfasilitasi dan menghambatnya.

Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang bagaimana pemerintah daerah melaksanakan implementasi kebijakannya terkait perencanaan pembangunan Monumen Reyog sebagai Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya wisata di sepanjang fase pengembangan.

Gambar 1.1 Model proses Teori Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Mater



Sumber data dari <https://kertyawitaradya.wordpress.com/>

H. Definisi Operasional

Definisi operasional memperjelas makna suatu istilah dengan menjelaskan kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Definisi operasional ini mencakup klarifikasi terminologi yang digunakan dalam penelitian. Sebagaimana dinyatakan Komaruddin (1994: 29), "Definisi istilah adalah pemahaman yang lengkap tentang suatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama istilah tersebut." (Kommarudin, 2021) Untuk memastikan bahwa setiap variabel penelitian memiliki batasan yang jelas, terukur, dan sesuai konteks, definisi operasional sangat penting. Dalam penelitian ini, beberapa konsep kunci diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Dalam studi ini, implementasi kebijakan mengacu pada pelaksanaan program dan tindakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang selaras dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku terkait perencanaan pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo. Implementasi kebijakan dinilai dengan enam indikator dari model yang dikembangkan oleh Van Meter & Van Horn (1975):

- a. Tujuan dan standar kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakter organisasi yang melaksanakan implementasi
- d. Komunikasi antar organisas
- e. Disposisi pelaksana
- f. Faktor ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Pemerintah Daerah yang dimaksud mencakup seluruh instansi daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata, kebudayaan, dan pembangunan, terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dan lembaga pendukung lainnya. Variabel ini dapat dilihat dari kebijakan, program, dan strategi yang mereka terapkan.

3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan serangkaian prosedur terorganisir yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun, meningkatkan, dan memelihara Monumen Reyog Ponorogo. Variabel ini dinilai melalui dimensi-dimensi berikut:

- a. Penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan Panjang
 - b. Penetapan tujuan dan tugas
 - c. Penyaluran anggaran
4. Monumen Reyog Ponorogo

Monumen Reyog Ponorogo, yang terletak di Kabupaten Ponorogo, merupakan bangunan fisik yang dirancang sebagai monumen atau obelisk. Monumen ini berfungsi sebagai simbol kesenian tradisional Reyog Ponorogo yang tersohor di tingkat nasional dan internasional. Monumen ini tidak hanya berfungsi sebagai landmark atau penanda daerah, tetapi juga sebagai pusat identitas budaya, sarana pendidikan, dan objek wisata. Penelitian ini memposisikan Monumen Reyog Ponorogo sebagai aset strategis dalam kebijakan pemerintah daerah di bidang budaya dan pariwisata.

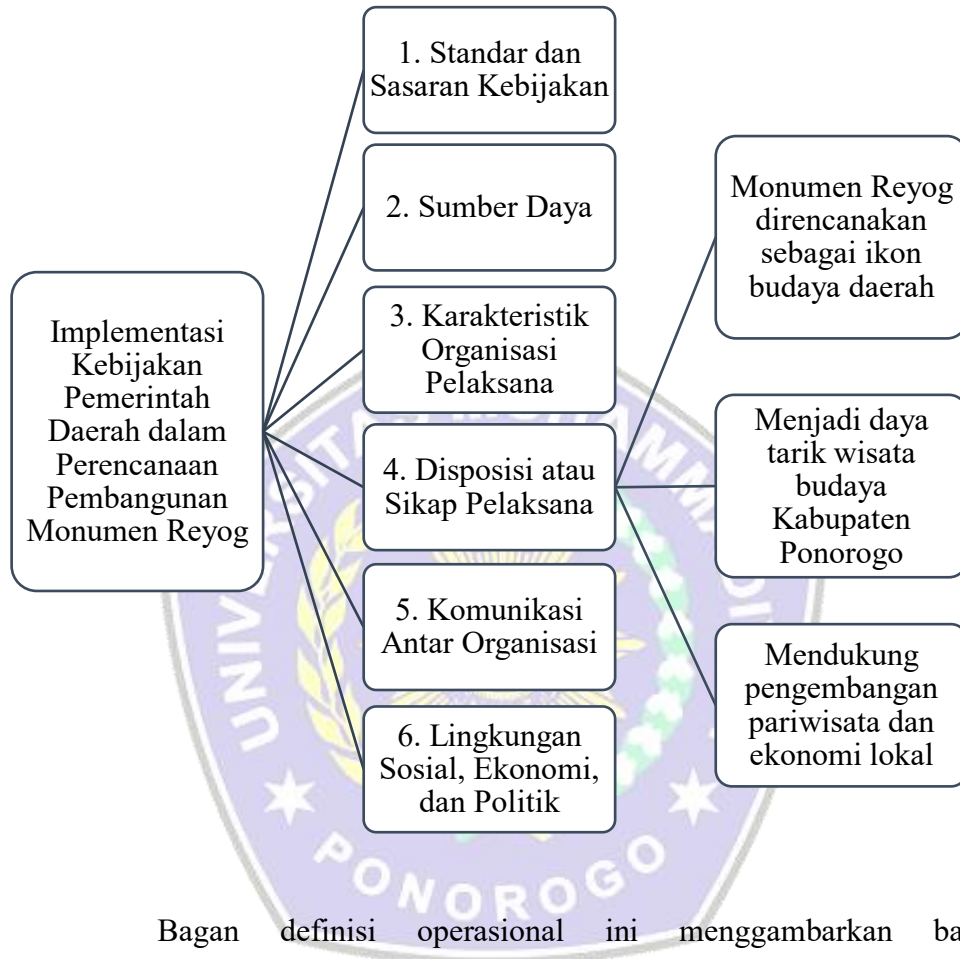
5. Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya Wisata

Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai budaya yang mampu menarik minat kunjungan wisatawan ke suatu daerah. Dalam penelitian ini, Sektor Pariwisata dan Identitas Budaya wisata dioperasikan sebagai kemampuan Monumen Reyog dalam menarik wisatawan melalui nilai budaya dan fasilitas pendukung yang dimilikinya.

Dalam studi ini, istilah "masa pembangunan" mengacu pada jangka waktu pelaksanaan inisiatif pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahap pembangunan tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur dan pariwisata, tetapi juga pengembangan budaya dan pembangunan fasilitas pendukung Monumen Reyog Ponorogo. Dengan kata lain, periode pembangunan merupakan konteks strategis bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat

pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo, sehingga menjadikannya ikon budaya dan pariwisata yang berdaya saing.

Gambar 1.2 Bagan Definisi Operasional



Bagan definisi operasional ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan Monumen Reyog dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana diuraikan dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Standar dan tujuan kebijakan

Kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan Monumen Reyog sebagai ikon budaya dan wisata.

b. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Monumen Reyog.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Struktur organisasi, pembagian tugas dan koordinasi antar perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Monumen Reyog.

d. Disposisi atau sikap pelaksana

Komitmen, pemahaman dan sikap para pelaksana kebijakan terhadap perencanaan pembangunan Monumen Reyog.

e. Komunikasi antar organisasi

Proses penyampaian informasi dan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan Monumen Reyog.

f. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Kondisi masyarakat, budaya lokal, dukungan politik, serta ekonomi yang mempengaruhi perencanaan pembangunan Monumen Reyog.

Keenam faktor ini saling terkait dan menentukan sejauh mana kebijakan perencanaan pembangunan Monumen Reyog dapat diimplementasikan secara efektif. Implementasi kebijakan yang sukses diharapkan menghasilkan rencana pembangunan Monumen Reyog yang terfokus, terkoordinasi dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Hasil akhir dari proses implementasi kebijakan ini adalah terwujudnya Monumen Reyog sebagai objek wisata budaya di Kabupaten Ponorogo, yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol pelestarian budaya lokal tetapi juga mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses implementasi kebijakan dan interelasi antar aktor, struktur, serta konteks kebijakan dalam konteks nyata (monumen Reyog Ponorogo). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami bagaimana implementasi kebijakan terjadi, maknanya, dan bagaimana kebijakan tersebut berubah seiring waktu berdasarkan sudut pandang para pihak yang terlibat. (Mackiewicz, 2020)

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai lokasi penelitian karena keberadaan Monumen Reyog Ponorogo dan penerapan kebijakan pengelolaannya. Lokasi penelitian difokuskan pada instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan budaya, terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelola monumen, tokoh masyarakat, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ponorogo. Selain itu penelitian ini juga ditujukan untuk mengamati langsung area di sekitar Monumen Reyog Ponorogo. Lokasi penelitian dipilih sebagai Monumen Reyog Ponorogo karena signifikasinya sebagai ikon budaya dan pariwisata, yang melambangkan identitas daerah dan menjadikan titik focus kebijakan Pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dianggap relevan untuk diteliti karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam tahap perencanaan dan masih dalam tahap pengembangunan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi seberapa baik kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola monumen ini sebagai simbol budaya dan objek wisata selama masa pembangunannya.

Tahap penelitian dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2025, dimulai dengan persiapan, dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis dan penulisan laporan. Jangka waktu yang dipilih menjamin

penelitian memiliki cukup waktu untuk mengum[pulkan data primer dan sekunder secara komprehensif.

3. Informan Penelitian

Pengambilan informan secara purposif digunakan untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini, dengan pemilihan berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Berdasarkan keahlian, pengalaman, dan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo, para informan dipilih. Informan tersebut meliputi:

- a. Pejabat/Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo Bertanggung jawab atas perancangan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata dan budaya, yang mencakup program pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo.
- b. Pengelola Monumen Reyog Ponorogo
Individu atau badan yang bertanggung jawab atas aspek teknis dan administratif pengoperasian dan pemeliharaan monumen sehari-hari.
- c. Pejabat/Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ponorogo
Badan yang bertanggung jawab atas penyusunan rencana dan anggaran pembangunan daerah, yang mencakup perencanaan pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo.
- d. Tokoh Masyarakat di Sekitar Monumen Reyog Ponorogo.
Orang-orang yang mewakili masyarakat setempat, memahami dampak Monumen Reyog Ponorogo, dan berpartisipasi dalam mendukung atau mengkritisi kebijakan terkait pengelolaan monumen.

4. Metode/ Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode utama untuk mengumpulkan data:

a. Wawancara

Dilakukan dengan informan kunci menggunakan pertanyaan terbuka. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengumpulkan informasi

yang lebih luas dan terperinci mengenai implementasi kebijakan, strategi, tantangan, dan dampak pengelolaan Monumen Reyog Ponorogo.

b. Observasi

Untuk memahami kondisi fisik Monumen Reyog Ponorogo, fasilitas pendukung wisata, interaksi masyarakat, dan kegiatan pemerintah daerah terkait pengelolaan monumen, peneliti melakukan observasi langsung di lokasi.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan bahan-bahan pendukung termasuk peraturan daerah, kebijakan pemerintah, laporan resmi, data statistik, foto, arsip kegiatan, dan publikasi lainnya. Dokumentasi ini melengkapi data primer dan memberikan gambaran sejarah Monumen Reyog Ponorogo.

5. Keabsahan Data

Dalam penelitian, pengujian validitas data seringkali hanya berfokus pada reliabilitas dan validitas. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif valid, reliabel, dan objektif, peneliti menggunakan instrumen yang terpercaya, informan yang mewakili populasi secara akurat, dan metode yang tepat untuk pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dinilai untuk memastikan data valid dan reliabel; sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, fokusnya adalah pada pengujian data itu sendiri. (Nu'man, 2023) Keabsahan data merupakan komponen penting dari penelitian kualitatif karena memastikan bahwa hasil yang diperoleh dengan menganalisis data secara garis besar. Untuk menjamin validitas (keabsahan) data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik verifikasi:

- a. Triangulasi sumber: Memeriksa silang detail yang diberikan oleh berbagai informan untuk menjamin koherensi data.
- b. Triangulasi teknik: Menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif.

- c. Member check: Memastikan bahwa kesimpulan atau interpretasi peneliti selaras dengan kesimpulan atau interpretasi informan untuk mencegah kesalahpahaman.

6. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahap utama:

- a. Reduksi Data

Metode penyaringan, peringkasan, dan pemusatan data mentah ke dalam format yang lebih terstruktur sesuai dengan fokus penelitian.

- b. Display Data

Menampilkan data yang telah diringkas dalam bentuk cerita, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman dan pemeriksaan.

- c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Memahami data yang disajikan untuk mencapai kesimpulan yang konsisten dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Proses ini dilakukan secara iteratif selama pengumpulan data, yang memastikan pengumpulan dan analisis data berlangsung secara bersamaan.

